

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Objek Penelitian**

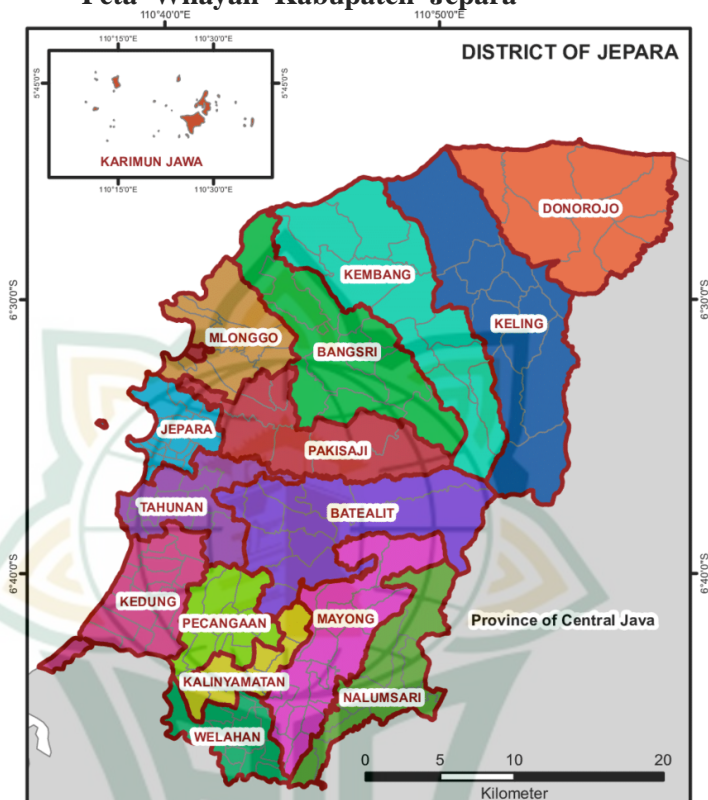
###### **a. Profil Kabupaten Jepara**

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara dibagi menjadi empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa. Ada banyak tempat pariwisata di Kabupaten Jepara, yang terkenal adalah wisata pantainya, karena memang Kabupaten Jepara dekat dengan laut. Jarak terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak yang terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 104.740,657 ha. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 11.661,811 ha dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.604,790 ha.<sup>1</sup> Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan dan 195 desa. Secara lebih detail, peta wilayah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar 4.1.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jepara, diakses 10 Januari 2023, <https://jeparakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Nzg5YmUxZDQyZjk5YzY4YTNiMjE1MTcy&xzmn=aHR0cHM6Ly9qZXBhcmFrYWlucyYnBzLmdvLmlkL3B1YmxyY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvNzg5YmUxZDQyZjk5YzY4YTNiMjE1MTcyL2thYnVwYXRlbi1qZXBhcmEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twoadfnearfeauf=MjAyMy0wMS0xNCAwODo1NTozMg%3D%3D>.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Jepara**



Sumber: [jeparakab.bps.go.id](http://jeparakab.bps.go.id)

Secara Geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' i48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5°43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan;. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- Sebelah Barat :Laut Jawa
- Sebelah Utara :Laut Jawa
- Sebelah Timur :Kabupaten Kudus & Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan :Kabupaten Demak<sup>2</sup>

Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi incaran para investor asing untuk dijadikan sebagai daerah yang berpotensi sebagai

<sup>2</sup> “Pengamat: Wikipedia Ensiklopedia Bebas,” diakses 15 Desember 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara).

kawasan industri, dan terbukti sekarang perusahaan-perusahaan industri dijepara sangat banyak. Dengan adanya perusahaan yang banyak maka otomatis akan menyerap banyak juga tenaga kerja. Sehingga dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Selain dari perusahaan tersebut Kabupaten juga mempunyai banyak destinasi wisata yang menarik, tempat penginapan dan resto/cafe, berbagai ragam kuliner yang khas dan menjadi daya tarik pengunjung atau wisatawan untuk menikmatinya dan sangat berpengaruh pada perekonomian. Ekonomi Jepara pada tahun 2020 tumbuh -1,94 persen dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019 yaitu 6,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebanyak 25,37 persen.<sup>3</sup>

Kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara, jika perekonomian masyarakat mengalami peningkatan maka secara otomatis pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara juga meningkat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Untuk mengolah dan mengstruktur pendapatan asli daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

#### **b. Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Kabupaten Jepara**

Berikut adalah realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir Kabupaten Jepara tahun 2011-2021 dengan target yang telah ditetapkan:

##### **1) Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.**

Pendapatan pajak hotel dapat ditingkatkan dengan efektifitas pemungutan pajak hotel. hotel sendiri merupakan bangunan khusus yang memiliki tujuan ketersediaan bagi individu yang

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jepara, diakses 15 Desember 2011, <https://jeparakab.bps.go.id/pressrelease/2021/05/10/65/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jepara-2020.html>.

akan menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lain yang terkait dengan kegiatan perhotelan dengan adanya pemungutan biaya, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.<sup>4</sup> Potensi pajak hotel perlu digali lagi sehingga realisasi pajak hotel dapat berpengaruh pendapatan asli daerah. Besarnya tingkat pendapatan pajak hotel dapat dilihat dari realisasi pajak hotel yang didapatkan setiap Kabupaten. Berikut adalah realisasi pendapatan pajak hotel Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2011	Rp 300.000.000	Rp 385.553.136	128 %
2012	Rp 335.200.000	Rp 453.428.535	135 %
2013	Rp 400.000.000	Rp 461.707.713	155 %
2014	Rp 420.400.000	Rp 447.705.354	106 %
2015	Rp 430.400.000	Rp 576.160.500	133 %
2016	Rp 486.000.000	Rp 832.543.048	171 %
2017	Rp 1.118.000.000	Rp 1.410.111.253	126 %
2018	Rp 2.200.000.000	Rp 1.821.531.562	82 %
2019	Rp 3.700.000.000	Rp 2.907.019.054	78 %
2020	Rp 6.000.000.000	Rp 1.139.363.268	18 %
2021	Rp 6.000.000.000	Rp 2.193.378.058	36 %

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara

Tabel 4.1 dalam kurun waktu 11 tahun terakhir yaitu 2011-2021, pendapatan pajak hotel hampir mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Dilihat dari angka rasio efektivitasnya mengalami pencapaian tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 171 %, berarti kemampuan Kabupaten Jepara dikategorikan sangat efektif dalam merealisasikan pajak hotel karena pendapatan pajak hotel telah melampaui target yang ditetapkan. Kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan sampai di tahun 2020 mendapatkan angka rasio efektivitas yang terendah yaitu 18 %, hal ini

<sup>4</sup> Setu Setyawan, dkk., *Perpajakan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 224.

disebabkan karena realisasi pajak hotel tidak melampaui target yang ditetapkan oleh Kabupaten Jepara. Salah satu penyebabnya adalah karna adanya masa pandemi covid-19 yang terjadi dan pemerintah membatasi kegiatan dan aktifitas diluar rumah. Sehingga realisasi pendapatan pajak hotel terjadi penurunan. Tetapi pada tahun 2021 terjadi mulai kestabilan kembali dan mendapatkan angka rasio efektivitas 36% dengan realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp 2.193.378.058. Karena telah dibukanya kembali hotel-hotel dan mulai beroperasi normal lagi setelah pandemi covid-19 berakhir.

## 2) **Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.**

Pajak restoran adalah pelayanan atas restoran. Merupakan pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Jepara yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya.<sup>5</sup> Besarnya tingkat pendapatan pajak restoran dapat dilihat dari realisasi pajak restoran yang didapatkan setiap Kabupaten. Berikut adalah realisasi pendapatan pajak restoran Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

**Tabel 4.2**

**Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>
2011	Rp 450.000.000	Rp 579.355.550	12 %
2012	Rp 550.000.000	Rp 579.237.368	105 %
2013	Rp 575.000.000	Rp 638.873.339	111 %
2014	Rp 595.000.000	Rp 767.368.995	128 %
2015	Rp 700.000.000	Rp 918.991.849	131 %
2016	Rp 800.000.000	Rp 1.124.852.474	140 %
2017	Rp 2.250.000.000	Rp 3.891.767.888	172 %
2018	Rp 5.180.000.000	Rp 7.138.384.684	137 %
2019	Rp 6.680.000.000	Rp 9.583.952.329	143 %
2020	Rp 10.000.000.000	Rp 8.562.059.701	85 %
2021	Rp 10.000.000.000	Rp 11.049.279.198	110 %

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara

<sup>5</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 23.



Tabel 4.2 diketahui Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka rasio paling besar pada tahun 2017 sebesar 172%. Tingkat rasio efektivitas pajak restoran dikategorikan sangat efektif karena telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Kemudian mengalami penyusutan yang drastis pada tahun berikutnya adalah sebesar 85%, yang dipengaruhi dari beberapa faktor salah satunya adalah dampak yang terjadi pada saat masa pandemi covid-19. Banyak restoran, warteg dan tempat makan lainnya yang tidak beroperasi dan masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan hanya dirumah saja selama pandemi covid-19 terjadi. Namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 110 %. Karena telah dibukanya kembali restoran, warteg dan tempat makan lainnya dan mulai beroperasi normal lagi setelah pandemi covid-19 berakhir.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Kabupaten Jepara sudah efektif dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Disebabkan karena realisasi pajak restoran hampir pertahun lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan pada Kabupaten Jepara. Pemerintah yang ada juga harus mampu memperbaiki pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran khususnya dalam pemungutan terhadap setiap wajib pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan. Hal ini menggambarkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis dari pajak daerah penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>6</sup> Dengan ini maka wajib pajak bahkan masyarakat selaku subjek pajak juga dapat menyadari bahwa pentingnya membayar pajak sehingga pada tahun selanjutnya penerimaan dan pendapatan Pajak Restoran semakin meningkat.

---

<sup>6</sup>Alda, "Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", *Jurnal Akutansi Syariah* vol. 6, no. 1 (2022) : 64.

### 3) Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

Banyaknya tempat wisata, tempat makan atau restoran bahkan hotel memberikan peluang besar bagi Kabupaten Jepara sebagai sumber pendapatan asli daerah, khususnya di sektor pajak parkir. Banyak wisatawan mengunjungi dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka, selain itu banyak juga yang menggunakan bus pariwisata. Kendaraan yang mereka gunakan tersebut, berdampak pada lokasi parkir di pemerintah Kabupaten Jepara yang terus dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Sumber penerimaan dari pajak parkir akan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang terdapat didalam pajak daerah, sedangkan pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.<sup>7</sup> Besarnya tingkat pendapatan pajak parkir dapat dilihat dari realisasi pendapatan pajak parkir yang didapatkan setiap Kabupaten. Berikut adalah realisasi pendapatan pajak restoran Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2011-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2011	Rp 41.000.000	Rp 41.847.900	102 %
2012	Rp 35.000.000	Rp 37.533.100	107 %
2013	Rp 35.000.000	Rp 40.654.500	116 %
2014	Rp 35.000.000	Rp 39.384.500	112 %
2015	Rp 35.000.000	Rp 54.318.000	155 %
2016	Rp 45.000.000	Rp 68.769.800	152 %
2017	Rp 75.000.000	Rp 95.076.940	126 %
2018	Rp 75.000.000	Rp 78.516.600	104 %
2019	Rp 75.000.000	Rp 87.132.010	116 %
2020	Rp 500.000.000	Rp 38.047.700	7 %
2021	Rp 500.000.000	Rp 51.968.001	10 %

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara

<sup>7</sup> Rukwi, "Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Cimahi", *Jurnal Akutansi* vol. 10, no.2 (2018) : 77.

Tabel 4.3 diketahui Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2015 yang mendapat angka rasio efektivitas tertinggi yaitu 155%, berarti tingkat rasio efektivitas pajak parkir dikategorikan sangat efektif karena telah mencapai target yang ditetapkan dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 7%, karena realisasinya tidak dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 realisasi pendapatan pajak parkir lebih sedikit dari target yang diberikan pada Kabupaten Jepara, karena terkena dampak dari pandemi covid-19 yang sedang terjadi. Oleh karena itu pemungutan pelaksanaan Pajak Parkir harus terus di gali dan dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di tahun yang akan mendatang, agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pula. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak parkir mulai mengalami peningkatan. Karena telah dibukanya kembali wisata, restoran dan tempat lainnya sehingga berdampak pada tempat parkir yang yang disediakan dan mulai beroperasi normal lagi setelah pandemi covid-19 berakhir.

## 2. Analisis Data

### a. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas terjadi distribusi normal atau tidak. kriteria pengujian normalis data sebagai berikut:

- a) Data terdistribusi normalitas, jika nilai signifikan  $>0,05$ .
- b) Data tidak terdistribusi normalitas, jika nilai signifikan  $<0,05$ .

**Tabel 4.4 Uji Normalitas  
Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov**

Jumlah Data	Sig.	Kesimpulan
11	,200	Normal

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

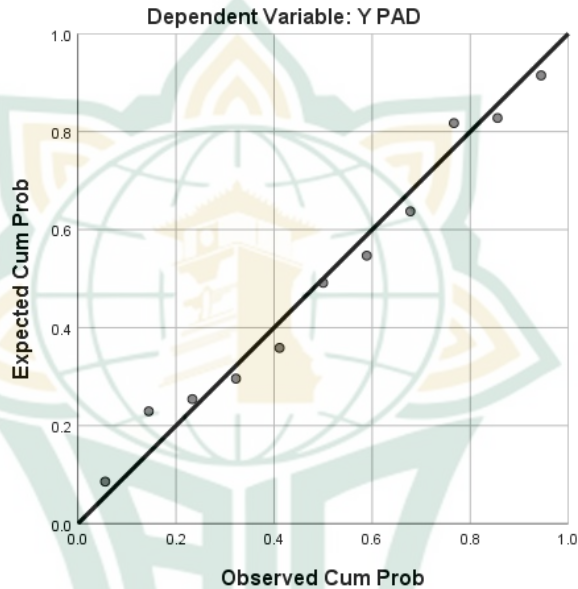
Tabel 4.4 dengan pengujian Kolmogorov-



*Smirnov* bahwa hasil signifikansinya yaitu 0,200 itu berarti nilainya diatas 0,05 maka data tersebut normal. Hal tersebut juga dapat dijelaskan dengan hasil analisis grafik yaitu grafik Normal P-P Plotnya sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Normal P-P Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pengujian gambar 4.2 dengan menggunakan grafik normal plot menunjukkan bahwa pada grafik normal terlihat titi-titik yang menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya lebih dekat dengan garis diagonal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi regresi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dengan kriteria jika tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen apabila nilai tolerance volue diatas 0,1 dan variance inflastion factor (VIF) dibawah 10, begitupun sebaliknya.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Uji Multikolinieritas**

Data	Jumlah Data	Tolerance	VIF	kesimpulan
Pajak Hotel	11	0,071	8,014	Tidak terjadi gejala multikolinieritas
Pajak Restoran	11	0,111	9,047	Tidak terjadi gejala multikolinieritas
Pajak Parkir	11	0,301	3,321	Tidak terjadi gejala multikolinieritas

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Berdasarkan pengujian yang dilakukan bahwa nilai kolerasi antar variabel yaitu pajak hotel nilai tolerance 0,071 dan nilai VIF 8,014. Selanjutnya pajak restoran mendapatkan nilai tolerance 0,111 dan VIF 9,047. Kemudian pajak parkir nilai tolerance 0,301 dan VIF 3,321. Berarti semua variabel independen memiliki nilai tolerance  $>0,1$  dan nilai VIF  $<10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. kriteria pengujian heteroskedastisitas data sebagai berikut:

- a) Data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, jika nilai signifikan  $> 0,05$ .
- b) Data terjadi masalah heteroskedastisitas, jika nilai signifikan  $< 0,05$ .

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas**

Data	Jumlah Data	Sig.	Kesimpulan
Pajak Hotel	11	0,388	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Pajak Restoran	11	0,554	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
Pajak Parkir	11	0,293	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Berdasarkan hasil uji gletjser tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai pajak hotel nilai signifikansinya 0,388, pajak restoran nilai signifikansinya 0,554 dan pajak parkir nilai signifikannya 0,293 yang memiliki nilai signifikan  $>0,05$ . Berarti dari data tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

**4) Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan Uji DW untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan  $d_u$  dan  $d_l$  pada tabel.berikut adalah hasil pengujiannya:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Uji Autokorelasi**

Jumlah Data	Durbin-Watson	Kesimpulan
11	1.218	Tidak terdapat autokolerasi positif.

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Diketahui bahwa:

n: 11 (jumlah data/tahun)

k : 3 (variabel bebas)

d : 1.218

$d_l$  : 0,5948

$d_u$  : 1,9280

Kesimpulannya  $d_l < d < d_u$  artinya tidak terdapat autokorelasi positif.

**b. Uji Hipotesis**

**1) Analisis Regresi Linear Berganda**

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap Variabel terikat.

**Tabel 4.8**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai Sig.
Constant	6.697E+10	0.316
Pajak Hotel	-131.185	0,158
Pajak Restoran	40.826	0,019
Pajak Parkir	3455.773	0,068

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.8, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6.697E+10 - 131,185 X_1 + 40,826 X_2 + 3455,773 X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta sebesar 6,697 dapat diartikan bahwa jika nilai variabel bebas yaitu pajak hotel ( $X_1$ ), pajak restoran ( $X_2$ ) dan pajak parkir ( $X_3$ ) dianggap konstan atau nol maka nilai variabel nilai pendapatan asli daerah ( $Y$ ) sebesar 6,697.
- b) Nilai koefisien variabel independen pajak hotel ( $X_1$ ) sebesar  $-131,185$  bertanda negatif. Artinya apabila variabel pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 13.118,5 Rupiah.
- c) Nilai koefisien variabel independen pajak restoran ( $X_2$ ) sebesar 40.826 bertanda positif. Artinya apabila variabel pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 4.082,6 Rupiah.
- d) Nilai koefisien variabel independen pajak parkir ( $X_3$ ) sebesar 3455.773 bertanda positif. Artinya apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 345.577,3 Rupiah.
- e) Koefisien  $e$  atau error menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk menjelaskan besarnya prosentase atau berapa persen variasi dari variabel dependen ( $Y$ ) yang dijelaskan oleh variabel independen ( $X$ ).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Variabel Y	Variabel X	R Square
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	0,820
	Pajak Restoran	
	Pajak Parkir	

*Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Data tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai  $R^2$  sebesar 0,820 atau 82,0%. Hal ini berarti 82,0% pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya yaitu 0,18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### 3) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan digunakan untuk mengukur secara keseluruhan atau bersama-sama kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Pengujian Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	0,005	Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
	Pajak Restoran		
	Pajak Parkir		

*Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022*

Hasil pengolahan data tabel 4.10 bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,005 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



#### 4) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji t) digunakan untuk mengukur secara terpisah atau sendiri-sendiri kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga nantinya nantinya akan diketahui ada dan tidaknya berpengaruh secara parsial.

**Tabel 4.11**

**Hasil Pengujian Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	0,158	Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
	Pajak Restoran	0,019	Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
	Pajak Parkir	0,068	Pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Sumber : Data olahan dari IBM SPSS 26, 2022

Dari pengujian data pada tabel 4.11 bahwa:

- a) Pajak hotel memiliki nilai signifikansi 0,158 berarti nilainya  $>0,05$ , artinya pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.
- b) Pajak restoran memiliki nilai signifikansi 0,019 berarti nilainya  $<0,05$ , artinya pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.
- c) Pajak parkir memiliki nilai signifikansi 0,068 berarti nilainya  $>0,05$ , artinya pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

#### B. Pembahasan

Hasil riset yang telah dilakukan diatas, hasilnya kemudian di analisis mengenai pengaruh antar variabel, yaitu Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap PAD Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021 (Menurut Perspektif Ekonomi Islam). Adapun hasil dari analisa dan hasil pembahasan penelitian sebagai berikut:

## 1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikansi  $0,158 > 0,05$  yang artinya bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Kemudian pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar  $-131,185$  dan hasilnya negatif, ini menunjukkan indikasi tidak adanya hubungan yang searah, artinya apabila variabel pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 13.118,5 Rupiah.

Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil realisasi pendapatan pajak hotel bahwa pajak hotel selama 11 tahun mengalami naik turun yang disebabkan oleh para pengunjung hotel di Kabupaten Jepara, karena kebanyakan pengunjung hotel yang datang pada saat libur panjang, kemudian minat pengunjung hotel juga sedikit karena kebanyakan wisatawan hanya orang asli jepara sendiri atau tetangga kota seperti pati demak dan kudus yang terdekat dari jepara. Jarak tempuh yang dekat tersebut sehingga mereka lebih memilih untuk kembali pulang dari pada menginap dihotel dan terkena dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup> Sehingga dari masalah tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian ini berarti tidak didukung oleh Teori Harrod Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi beranggapan bahwa modal harus digunakan secara efektif karena pertumbuhan ekonomi mempengaruhi terhadap peranan pembentukan modal. Teori ini juga membahas pendapatan nasional dan kesempatan kerja yang dilakukan oleh masyarakat, pembisnis dan pengusaha dari tingkat pendapatan yang dimilikinya. Modal yang semakin besar tersebut akan dapat berguna dalam meningkatkan

---

<sup>8</sup>Adhityo, DwityaBinar, Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara),” diakses 16 Desember 2022,

<https://onsearch.id/Record/IOS4666.106551/Details>.

ketersediaan modal yang dibutuhkan dalam perekonomian.<sup>9</sup> Namun jika pembisnis (pemilik hotel) kekurangan modal atau mempunyai modal minim sehingga untuk memberikan fasilitas pelayanan hotel kurang, sehingga dapat menyebabkan sedikitnya penginap dan hal itu dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Tetapi juga mempunyai modal yang cukup untuk memfasilitasi pelayanan hotel maka daya minat penyinap akan meningkat karena mereka merasa nyaman.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tezza Alvira, Pan Budi Marwoto dan Rizal Ruben Manullang (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang, menyatakan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah kota pangkalpinang.<sup>10</sup>

## **2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.**

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa pajak restoran memiliki nilai signifikansi  $0,019 < 0,05$  yang artinya bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Kemudian pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 40.826 bertanda positif. Artinya apabila variabel pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 4.082,6 Rupiah.

Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil realisasi penerimaan pajak restoran bahwa pajak restoran selama 11 tahun mengalami pendapatan cenderung naik yang disebabkan oleh para pengunjung restoran di Kabupaten

---

<sup>9</sup> Frisdiantara Christea, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris* (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 11.

<sup>10</sup> Tezza Alvira, Pan Budi Marwoto dan Rizal Ruben Manullang, Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang, *Accounting Program Jurnal Progresif Akutansi Bisnis STIE-IBEK Bangka Belitung Pangkalpinang, Indonesia, Jurnal Akutansi Bisnis dan Ekonomi* vol. 5, no. 1, Maret 2019, 39.

Jepra hampir setiap hari baik yang datang langsung ke restoran maupun take-away. Kemudian Semakin banyaknya pengunjung yang datang maka penerimaan pajak restoran akan menambah dan otomatis akan berpengaruh terhadap PAD.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi Joseph Alois Schumpeter mengungkapkan jika para pengusaha mengadakan Inovasi dan dan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Schumpeter berkeyakinan bahwa faktor penting pertumbuhan ekonomi adalah pembaharuan yang dilakukan oleh kalangan entrepreneur. Pembaharuan yang dimaksud Schumpeter adalah sebuah langkah baru bagi pengusaha dan bisnis. Penerimaan pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal.<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan (2020) dengan judul Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018), menyatakan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Brebes.<sup>12</sup>

### **3. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021.**

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa pajak restoran memiliki nilai signifikansi  $0,068 > 0,05$  yang artinya bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Kemudian pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>11</sup> Syifa, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bnadung Periode 2013-2020", *Jurnal Ilmiah Akutansi* vol.12, no 3 (2021) : 22.

<sup>12</sup> Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan, Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018), Universitas Muhadi Setiabudi Brebes Indonesia, *Journal of Accounting and Finance* vol. 1 no. 1, Agustus 2020,49.

hasil koefisien regresi sebesar 3455.773 bertanda positif. Artinya apabila variabel pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 345.577,3 Rupiah.

Pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini dikarenakan realisasi pajak parkir yang rendah dan tidak sesuai dengan potensi yang ada. Walaupun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun itu masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Keterangan dari Bu Amy salah satu staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara bagian Pelayanan Pajak Daerah mengatakan bahwa kurangnya masih lahan untuk dijadikan tempat parkir, masih ada sebagian badan usaha yang menyediakan tempat parkir namun belum mendaftarkan tempat parkirnya selaku objek pajak dan ditambah dengan terjadi pandemi covid-19 yang mempengaruhi pendapatan termasuk pajak parkir. Karena saat pandemi orang-orang atau penduduk jarang dan hampir tidak melakukan kegiatan diluar rumah sampai sekolah dan bekerja dilakukan online atau *work from home* (WFH) sehingga jarang orang untuk parkir kendaraannya. Karena setiap kendaraan yang dititipkan ditempat penyediaan tempat parkir tersebut akan dikenakan pemungutan biaya.<sup>13</sup> Sehingga dapat berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Penelitian ini berarti tidak didukung oleh Teori Adam Smith dalam teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and causes of the wealth of Nations* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi karena bertumpu pada penambahan penduduk. Pendapat ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk akan mendorong berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyak penduduk yang makan semakin meningkat juga pendapatan yang diperoleh.<sup>14</sup> Saat penduduk bepergian maka tempat penyediaan parkir akan mendapatkan pajak parkir berpengaruh. Namun pada olahan data yang diteliti

---

<sup>13</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 131.

<sup>14</sup> “Pengamat: Ruang Guru,” diakses 10 Januari 2023, <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-pertumbuhan-ekonomi-dan-teori-teori-pendukungnya>.



oleh peneliti pendapatan pajak parkir tidak dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Karena data realisasi pendapatan pajak parkir kontribusinya cukup kecil terhadap pendapatan asli daerah. Sebaiknya pemerintah dapat lebih mengoptimalkan sumber pendapatan pajak parkir maka potensi penerimaan pajak parkir akan dapat berkontribusi dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayora Fajarty, Fatahurrazaq dan Asmaul Husna (2020) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2016-2018, menyatakan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintang.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Mayora Fajarty, Fatahurrazaq dan Asmaul Husna, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2016-2018, Universitas Maritim Raja Ali Haji, *Student Online Journal* Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, 237.